

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi Sektor Publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/ atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Organisasi sektor publik disebut entitas ekonomi karena organisasi ini memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tidak kecil serta melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Secara garis besar, organisasi sektor publik dibagi menjadi tiga, yaitu instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah, dan organisasi nirlaba milik swasta. (Dedi Nordiawan).

Pemerintah adalah entitas pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, karena laporan keuangan terutama digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Masih terdapat banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*)

meningkat. Hal itu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas dinilai sangat penting dalam mewujudkan *good government*. Hal itu dilakukan melalui laporan keuangan yang telah diaudit secara profesional. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sudah direvisi

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti keperluan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pengevaluasian kinerja pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah wajib memperhatikan dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa ada empat kriteria atau karakteristik yang menjadikan laporan keuangan berkualitas yaitu 1) relevan, 2) handal, 3) dapat dibandingkan, dan 4) dapat dipahami.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komponen Laporan Keuangan Berbasis Akrual**

1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL);
3.	Neraca;
4.	Laporan Operasional (LO);
5.	Laporan Arus Kas (LAK);
6.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7.	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah sudah berkualitas yaitu Opini wajar pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksaan keuangan terhadap LKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan dapat diketahui bahwa di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas 537 LKPD Tahun 2016 dalam 5 tahun terakhir (2012-2016), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, BPK menyatakan bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan. Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) atau TMP menjadi opini WDP, sementara itu jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan. Pengembangan opini selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016 Tingkat Pemerintah Daerah**

<b>LKPD (Tahun)</b>	<b>Opini</b>			
	<b>WTP (%)</b>	<b>WDP (%)</b>	<b>TMP (%)</b>	<b>TW (%)</b>
<b>2012</b>	<b>23</b>	<b>61</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
<b>2013</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>2014</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>2015</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>2016</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

(Sumber: <http://www.bpk.go.id/ihps> - IHPS I 2017)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan sejumlah alasan Pemprov DKI mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk keempat kalinya, yang dilakukan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Anggota V BPK RI Ismayatun menjelaskan, ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait aset tetap, piutang pajak dan piutang lainnya yang berdampak pada kewajaran laporan keuangan. Sejumlah permasalahan yang masih ditemukan ialah sistem informasi aset yang belum mendukung pencatatan aset sesuai standar akuntansi, inventarisasi aset yang belum selesai, data kartu Inventaris Barang tidak informatif dan tidak valid. (David Oliver Purba. 2017. Diakses tanggal 6 Mei 2018).

Adapun fenomena yang terjadi tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung pada tahun 2017 adalah Laporan Keuangan Pemkot Bandung sampai saat ini belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Jawa Barat. Pasalnya, dari hasil penilaian BPK, Kota Bandung masih terganjal

masalah aset. Menurut Ketua BPK Jawa Barat Arman Syifa, selain Kota Bandung yang belum mendapat opini WTP yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Subang. Secara umum ketiga kota/kabupaten ini tersandung permasalahan aset, terdapat beberapa aset yang tidak diketahui keberadaannya dan pemanfaatannya pun masih belum jelas. Masalah aset tersebut telah memenuhi ambang batas yang ditentukan, padahal permasalahan ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. (Yedi Supriadi. 2017. Diakses tanggal 27 Februari 2018).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung belum berkualitas karena masih belum memenuhi karakteristik kualitatif yang diisyaratkan, sehingga pemerintah perlu membenahi bagian penatausahaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memperoleh opini WTP dari BPK yang menjadi target Pemerintah Kota Bandung.

Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bandung Dadang Supriatna menegaskan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus menguatkan kordinasi dan kerja samanya agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dadang mengungkapkan, SPIP tahun 2018 ini sudah berjalan dan dibentuk pada April lalu, namun belum bisa mencapai angka kepuasan. Salah satu tingkat kematangan dari level SPIP ini tidak bisa hanya bergantung pada satuan tugas (satgas) di level Pemkot Bandung, tetapi juga bergantung pada satgas yang ada di tiap Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam upaya penyebaran informasi untuk pembinaan SPIP dan peningkatan sumber daya manusia dalam kinerja pengendalian keuangan negara yang akuntabel maka dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Penilaian Maturitas SPIP pada perangkat daerah di Lingkungan Pemkot Bandung pada 2 Mei 2018. (Dadang Supriatna. 2018. Diakses tanggal 6 Mei 2018).

Menurut pengamat pemerintahan dari Universitas Indonesia Ratna Wardhani, ada perubahan ke arah positif semenjak pemerintah menerapkan *accrual accounting* (akuntansi berbasis akrual) pada tahun 2015. Banyak pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga mendapat peningkatan opini dalam laporan keuangannya setelah *accrual accounting* diterapkan. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual ini, faktor utama dalam menerapkan *accrual accounting* ini adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Saat ini, masih sedikit sarjana akuntansi yang berminat masuk pemerintahan. Kebutuhan sarjana akuntansi di kota-kota besar masih dapat terpenuhi, namun semenjak daerah didorong untuk membuat laporan keuangan terkait dana desa, kebutuhan sarjana akuntansi meningkat. (Intan Fauzi. 2016. Diakses tanggal 8 Maret 2018).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) sepanjang semester I tahun 2017, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan ada 6.053 ketidakpatuhan dalam pengelolaan finansial negara. BPK menyebut ada tiga sektor utama permasalahan yang berpengaruh kepada ketidakpatuhan penyusunan laporan keuangan terhadap undang-undang. Permasalahan yang paling banyak adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang mencapai angka 2.657 permasalahan yang terjadi pada 533 pemda dengan detail penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 380 pemda, perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 405 pemda, pelaksanaan kebijakan mengakibat

hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 255 pemda, serta kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 404 pemda. Selanjutnya yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 2.156 permasalahan yang terjadi pada 523 pemda dengan detail proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 418 pemda, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 421 pemda, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai terjadi pada 241 pemda, serta kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 42 pemda. Dan yang ketiga kelemahan struktur pengendalian internal sebanyak 1.240 permasalahan yang terjadi pada 452 pemda, dengan detail SOP belum disusun/ tidak lengkap terjadi pada 308 pemda, SOP belum berjalan secara optimal terjadi pada 301 pemda, satuan pengawas intern tidak optimal terjadi pada 152 pemda serta permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 11 pemda. (www.bpk.go.id – IHPS I 2017, diakses tanggal 20 Februari 2018).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu kompetensi sumber daya manusia. Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan daerah masih ada yang kurang kompeten. Ini diartikan bahwa belum adanya kesadaran dari tiap-tiap individu yang berada dilingkungan pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap *good governance* (Gumilar, 2013).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan. (Roviyantie, 2011). Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat dibutuhkan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang Pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Dewi dan Yusrawati, 2015).

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau penggunaan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 pasal 232).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Perubahan atas sistem dan basis akuntansi dilakukan untuk mendapatkan laporan keuangan yang handal, relevan, dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Bastian (2010:4) mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (Entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang

dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk membuat keputusan (Mardiasmo, 2009).

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008). Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa Lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Desy Sefri Yensi (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di SKPD Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kota Bandung. Selain itu peneliti melakukan penelitian pada tahun 2014, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2018.

Telah banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Dicky Rahman (2015) yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmadani (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Artika (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Pemerintah Kota Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu:

1. Pada Pemerintah Kota Bandung masih terdapat sumber daya manusia yang kurang berkompeten.
2. Masih terdapat sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak sesuai dengan prosedur pada Pemerintah Kota Bandung
3. Sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Bandung masih kurang baik.
4. Laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung masih kurang berkualitas.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

6. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama yaitu tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah daerah mengenai masalah

pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4. Bagi pihak lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penulis akan melakukan Penelitian pada beberapa Dinas di Kota Bandung. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2018 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan untuk penyusunan skripsi.